



KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA

Oleh
Parsudi Suparlan

Konsep ketahanan sosial-budaya sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Sistem Ketahanan Nasional Indonesia mengacu pada kemampuan masyarakat Indonesia yang mempunyai keyakinan ideologi kebangsaan Indonesia dalam menanggapi berbagai tantangan dan serangan secara halus ataupun secara kasar terhadap ketahanan NKRI. Tantangan dan serangan terhadap NKRI tersebut akan secara sosial dan budaya dimentahkan atau ditolak oleh masyarakat Indonesia yang mempunyai loyalitas atau

kesetiaan terhadap kebangsaan Indonesia dan terhadap NKRI, baik secara perorangan, kelompok-kelompok sosial, maupun secara pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia sekarang ini dalam mengaktifkan ketahanan sosial-budaya adalah bahwa corak dan kualitas ketahanan sosial-budaya masyarakat Indonesia itu sangat sumir. Dengan kata lain, ketahanan sosial-budaya masyarakat

Indonesia tersebut hanya secara samar-samar ada, yaitu sebagai sebuah ideologi yang sekali-sekali datang dalam kehidupan orang Indonesia sebagai isu-isu politik kebangsaan yang datang dari sistem nasional atau pemerintah sehingga hanya merupakan buah bibir saja dalam kehidupan orang Indonesia. Karena itu, ideologi tersebut tidak pernah menjadi pengetahuan, keyakinan, dan nilai-nilai budaya orang Indonesia baik sebagai perorangan maupun sebagai bangsa.

Permasalahan ini muncul dan mantap dalam kehidupan orang Indonesia, karena :

1. Orang Indonesia hidup dalam masyarakat majemuk Indonesia yang memproduksi corak primordialisme suku-bangsa, keyakinan keagamaan, dan kelompok sosial atau komunitas.
2. Proses-proses globalisasi yang telah merasuk ke dalam kehidupan orang

Indonesia terutama di daerah perkotaan dan telah juga merasuk ke daerah pedesaan.

3. Tingginya tingkat korupsi dan kolusi serta nepotisme, baik secara kuantitas maupun secara kualitas yang dilakukan pejabat negara dan pengusaha.

Makalah ini akan menyajikan pembahasan mengenai ketahanan sosial-budaya dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan sumirnya ketahanan sosial-budaya orang Indonesia, seperti tersebut di atas, dan menyajikan sebuah alternatif cara-cara untuk membangun adanya ketahanan sosial-budaya sehingga menjadi pengetahuan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai budaya orang Indonesia. Makalah ini akan membahas corak masyarakat Indonesia yang majemuk dan upaya untuk menggantikannya menjadi bercorak multikultural, globalisasi dan berbagai dampak sosialnya, KKN dan

dampaknya terhadap ketahanan sosial-budaya, dan pemikiran mengenai cara-cara membangun ketahanan sosial-budaya.

Masyarakat Majemuk Indonesia

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, yaitu sebuah masyarakat negara yang dibangun dengan cara mempersatukan masyarakat-masyarakat sukubangsa menjadi sebuah bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia oleh sistem nasional atau pemerintah nasional. Model masyarakat majemuk Indonesia sekarang ini sebetulnya adalah kelanjutan dari model masyarakat majemuk zaman penjajahan Hindia Belanda dan Penjajahan Jepang. Pada masa sekarang kira-kira ada 500 sukubangsa di Indonesia, perkiraan ini didasarkan pada catatan Sensus 1930 dimana tercatat ada 300 sukubangsa tanpa propinsi Papua dan pada masa sekarang di propinsi Papua kira-kira ada 200 sukubangsa. Dengan mengacu pada Suparlan (2004a) diketahui bahwa diantara ciri-

ciri yang menyolok dari masyarakat majemuk, termasuk Indonesia, adalah:

1. Pemerintahan atau sistem nasional masyarakat majemuk cenderung bercorak otoriter dan militeristik.
2. Wilayah nasional Indonesia pada dasarnya adalah wilayah-wilayah masyarakat suku-bangsa setempat, karena sebelum adanya sistem nasional yang mempersatukan masyarakat-masyarakat sukubangsa tersebut, masyarakat-masyarakat suku bangsa itu sudah ada dan memiliki wilayah-wilayah tempat masyarakat suku-bangsa yang bersangkutan hidup. Hak atas wilayah-wilayah tersebut dikenal dengan nama hak ulayat atau hak adat. Dalam masing-masing wilayah sukubangsa tersebut kebudayaan suku-bangsa yang bersangkutan berkembang dan mantap

sebagai acuan atau pedoman bagi kehidupan anggota sukubangsa yang bersangkutan.

3. Adanya jenjang sosial yang dapat berkembang menjadi kelas sosial diantara kelompok-kelompok suku-bangsa dalam hubungan antar-sukubangsa. Jenjang sosial ini didasari oleh adanya stereotip dan prasangka yang menghasilkan adanya batas-batas sukubangsa yang tidak begitu saja dapat dilampaui oleh anggota-anggota sukubangsa yang berbeda untuk dapat terlibat dalam suatu kegiatan sosial dan budaya bersama.
4. Pentingnya kesukubangsaan atau jatidiri sukubangsa yang acuannya adalah sukubangsa dan atribut-atribut kebudayaan sukubangsanya yang diaktifkan secara selektif dalam interaksi-interaksi

sosial tersebut. Suku-bangsa sebagai golongan sosial askriptif merupakan golongan sosial yang amat penting. Oleh karena itu, di Indonesia tidak ada seorang pun yang tidak tergolong dalam suatu kesukubangsaan, karena setiap orang Indonesia dilahirkan dari orang tua yang berasal dari suatu sukubangsa atau yang berbeda sukubangsanya serta dilahirkan atau dibesarkan dalam suatu wilayah sukubangsa dan kebudayaannya.

5. Kebudayaan sukubangsa yang merupakan pedoman bagi kehidupan anggota-anggota sukubangsa yang bersangkutan berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia yang men-

cakup kebutuhan-kebutuhan biologi, kebutuhan-kebutuhan sosial dan kebutuhan-kebutuhan adab.

Kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia tersebut tercakup dalam pengetahuan, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai budaya yang ada dalam kebudayaan sukubangsa yang bersangkutan. Pengetahuan, keyakinan-keyakinan dan nilai budaya yang ada dalam ke-budayaan tidak dapat dilihat dan diperlakukan secara terpisah-pisah tetapi harus diperlakukan secara holistik dalam menghadapi dan memanfaatkan sesuatu kebutuhan. Dalam kehidupan yang nyata, kebudayaan menjadi operasional melalui pengetahuan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh orang perorang anggota masyarakat atau masyarakat sukubangsa

yang bersangkutan dan melalui pranata-pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat sukubangsa tersebut.

6. Agama-agama tradisi besar (Hindu, Budha, Kristen Protestan, Islam dan Katolik) telah masuk dan berkembang di Indonesia melalui masyarakat-masyarakat sukubangsa. Oleh karena itu variasi dalam keyakinan keagamaan juga berkembang dan menjadi mantap karena adanya pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang bersangkutan. Oleh karena masyarakat sukubangsa itu diinterpretasi dan diberi makna terlebih dahulu oleh anggota-anggota masyarakat sukubangsa yang bersangkutan dengan mengacu pada kebudayaan sukubangsanya sebagai pedoman bagi kehidupan mereka.

Melalui interpretasi dan pemaknaan ini, pengetahuan dan keyakinan-keyakinan, serta nilai-nilai budaya yang ada dalam agama tersebut dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi kehidupan mereka bersama-sama dengan kebudayaan yang mereka punyai. Oleh karena itu dalam sejumlah masyarakat sukubangsa, kebudayaan sukubangsa juga berisikan keyakinan-keyakinan keagamaan, dan terutama nampak menyolok dalam nilai-nilai budaya yang terwujud dalam kehidupan orang perorang anggota-anggota sukubangsa dan dalam corak pranata-pranata yang ada dalam masyarakat sukubangsa tersebut. Sedangkan dalam masyarakat sukubangsa lainnya terdapat kebudayaan sukubangsa yang coraknya bervariasi sesuai besar dan pentingnya fungsi keyakinan

keagamaan yang dipunyai oleh anggota-anggota sukubangsa dalam menghadapi dan memanfaatkan lingkungannya.

7. Primordialisme yang acuan-nya adalah pada kesukubangsaan, keyakinan keagamaan, dan komuniti asal anggota-anggota sesuatu sukubangsa menjadi penting dan utama dalam kehidupan mereka.

Primordialisme muncul dan diaktifkan dalam bentuk sentimen sukubangsa atau kesukubangsaan, kelompok kerabat dan keluarga, sentimen sesama keyakinan keagamaan melawan mereka yang kafir, dan dalam bentuk solidaritas kelompok kerabat dalam kehidupan kampung. Solidaritas muncul sebagai reaksi terhadap ancaman dari kelompok sukubangsa lain, atau keyakinan keagamaan

lain, atau ancaman dari kelompok lain. Solidaritas muncul dan diaktifkan untuk kepentingan memenangkan persaingan ekonomi, politik, dan sosial atau untuk kehormatan. Atau untuk kepentingan memenangkan sesuatu konflik dengan kelompok lain.

Dari uraian di atas jelas bahwa ketahanan sosial-budaya sebetulnya terbatas pada kelompok kerabat atau setidak-tidaknya pada keluarga, dan baru pada ketahanan kelompok sukubangsa, tetapi tidak ada landasan untuk menjadi ketahanan sosial yang berdimensi kebangsaan. Mungkin pernah terjadi dalam zaman pemerintahan presiden Sukarno yang programnya adalah membangun kebangsaan bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan lebih lanjut maka nampak bahwa ketahanan sosial-budaya yang primordial itu tergantung pada konteks-konteks yang dihadapi dan pada kepentingan-kepentingan yang dipunyai

oleh para pelaku yang bersangkutan. Bila kita ambil contoh dari pasca gempa dan tsunami yang melanda Aceh, diketahui bahwa orang Aceh tidak akan menolong mereka yang tertimpa musibah gempa atau tsunami bila mereka yang malang itu bukan anggota keluarga atau kerabatnya, dan bukan orang-orang yang dikenalnya.

Dari perspektif kemajemukan Indonesia yang merupakan faktor penghambat yang tidak kecil bagi terwujud dan mantapnya kebangsaan Indonesia dan keutuhan NKRI, dalam beberapa tulisan, antara lain Suparlan (2004a, 2004b) telah saya usulkan untuk mengubah corak kemajemukan suku-bangsa menjadi kemajemukan kebudayaan atau multikulturalisme.

Perubahan dari corak masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural adalah keputusan politik yang harus dilakukan oleh pemerintah nasional Indonesia. Kalau kita perhatikan *motto* lambang

negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, mungkin baru kita sadari bahwa *motto* tersebut berbunyi “Berbeda-beda (sukubangsa) tetapi satu (bangsa) juga”.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan.

Perbedaan yang dipunyai oleh golongan sosial askriptif, seperti sukubangsa, ras, gender, dan umur, sepanjang mereka itu adalah warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Melalui ideologi multikulturalisme maka berbagai bentuk diskriminasi sukubangsa atau asal, ras, gender, dan umur maka akan dapat ditiadakan. Dan, melalui kesederajatan tersebut berbagai batas-batas sukubangsa yang didasari oleh stereotip dan prasangka dapat dihindari sehingga ketahanan sosial-budaya masyarakat dan bangsa Indonesia akan dapat dibangun dan dimantapkan. Secara langsung ataupun tidak langsung multikulturalisme mendukung terlaksananya demokrasi yang telah mulai

menampakkan dirinya dalam kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana terwujud dalam Pemilu Presiden tahun 2004. Permasalahan utama dari terwujudnya masyarakat multikultural adalah hukum dan penegakkan hukum yang mendukung multikulturalisme. Tanpa itu maka multikulturalisme, disamping tanpa keputusan politik secara nasional, tidak akan dapat dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia.

Dampak-Dampak Proses-Proses Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah proses penyebaran kebebasan pasar dan demokrasi yang mendunia. Dalam dua dekade terakhir ini Amerika Serikat telah menyebarkan globalisasi ke seluruh Dunia Ketiga yang dilakukan oleh World Bank, IMF, dan WTO. Melalui berbagai badan pemerintahan yang ada dalam organisasi dan birokrasi Kedutaan Besar Amerika Serikat juga dilakukan berbagai upaya dan bantuan

yang telah diberikan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, Yayasan-Yayasan (*Foundations*), & LSM-LSM (*NGOs*) Amerika Serikat.

Pemikiran yang mendasar dari globalisasi adalah bahwa pasar dan demokrasi adalah dua unsur pokok dari sebuah resep yang berlaku universal untuk mengobati penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya keterbelakangan dan kemiskinan dalam kehidupan dari masyarakat-masyarakat di Dunia Ketiga. Karena pasar atau kapitalisme pasar adalah sistem ekonomi yang paling efisien, dan demokrasi adalah sistem politik yang paling adil dibandingkan berbagai sistem politik lainnya yang bercorak otoriter. Secara bersama-sama maka pasar dan demokrasi akan secara bertahap dapat membawa masyarakat dunia terutama Dunia Ketiga kepada suatu tingkat kemakmuran, akan menghentikan kebiasaan bangsa-bangsa yang suka berperang

menjadi bangsa-bangsa yang damai dan produktif, mengubah orang-orang yang fanatik menjadi orang-orang yang liberal dan terbuka pemikiran-pemikirannya, dan menjadikan mereka sebagai warga negara dan konsumen yang beradab.

Friedman (2000:ix) antara lain menyatakan bahwa penyebaran pasar bebas dan demokrasi ke seluruh dunia akan memungkinkan banyak orang yang akan mengubah aspirasi-aspirasi mereka yang negatif menjadi pemikiran-pemikiran yang positif, yaitu pemikiran-pemikiran yang inovatif dan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru yang menguntungkan. Menurut Friedman selanjutnya, globalisasi cenderung untuk mengubah semua teman dan lawan atau musuh menjadi pesaing dalam kegiatan-kegiatan bisnis yang adil. Dengan kata lain, berbagai konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia akan berubah menjadi kegiatan-kegiatan persaingan yang

sehat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan bisnis.

Globalisasi sebagai kebudayaan global telah dimungkinkan berhasil dengan digunakannya sistem informasi satelit dunia, tersebarnya pola-pola konsumsi dan konsumerisme yang mengglobal, antara lain, melalui *franchise*, diadopsi dan dimantapkannya gaya hidup kosmopolitan, berkembang dan meluasnya kegiatan pariwisata antar-negara, dan menurunnya kekuasaan negara-bangsa serta berkembangnya sistem militer global. Begitu juga kemunculan kebudayaan global ini ditandai oleh adanya kesadaran global tentang persebaran penyakit-penyakit yang belum ada obatnya seperti AIDS, kesadaran dan perluasan konsep HAM di seluruh dunia, kesadaran mengenai kompleksitas antar-hubungan agama-agama manusia, dan kesadaran bahwa dunia ini secara keseluruhan adalah sebuah dunia yang harus dikonstruksi secara terus menerus

untuk kehidupan yang lebih baik (lihat: Albrow dan King 1990).

Sesuatu kegiatan bisnis dapat menjadi global atau tidak tergantung pada pengorganisasian kegiatan-kegiatannya. Perdagangan dan industri manufaktur dapat menjadi kegiatan produktif yang global pada waktu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi sebuah produk yang utuh dengan membuat pabrik-pabrik untuk bagian-bagiannya di berbagai negara. Sehingga batas-batas kekuasaan negara produsen menjadi hilang atau kabur, dan bagian-bagian yang diproduksi diasembel di salah satu negara dan dipasarkan di negara-negara yang membutuhkan produk tersebut. Modal atau kapital dari perusahaan yang multinasional ini adalah dari para kapitalis berbagai negara.

Sesuatu kertas, sebagai sebuah blueprint, globalisasi nampak sangat bagus dan dapat memerangi kemiskinan, keterbelakangan, perang, dan fanatisme. Tetapi di dalam

kehidupan yang nyata globalisasi dapat membawa dampak-dampak sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang sebaliknya daripada yang diharapkan darinya sebagai resep untuk mengobati berbagai penderitaan dalam kehidupan manusia. Masyarakat yang pertama-tama terkena dampaknya adalah masyarakat perkotaan yang kebudayaan perkotaannya menekankan pada pentingnya uang. Uang sebagai alat ukur, sebagai modal atau kapital, dan sebagai komoditi. Melalui uang maka kegiatan-kegiatan pelayanan jasa, industri, bisnis, dan pasar dapat berjalan dan dikembangkan. Melalui uang juga maka berbagai kebutuhan konsumsi dari warga masyarakat dapat dipenuhi. Bukan hanya kebutuhan konsumsi yang pokok atau mendasar yang harus dipenuhi, tetapi berbagai kebutuhan konsumsi yang bermakna sosial dan budaya. Berbagai kebutuhan konsumsi yang bermakna sosial dan budaya ini terutama dalam fungsinya untuk pamer dan dijadikan

atribut-atribut bagi identitas atau jati diri dari golongan atau kelas sosial si pengguna.

Globalisasi yang menekankan pada pentingnya uang sebagai modal dan sebagai komoditi telah menghasilkan adanya sekelompok kecil warga kota yang mampu mengakumulasi uang sebagai modal dan sebagai komoditi. Mereka inilah yang mampu hidup secara global dengan gaya hidup kosmopolitan, atau hidup dengan biaya tinggi yang tidak mengenal batas-batas kekuasaan negara. Sedangkan sebagian besar masyarakat perkotaan dan pedesaan hidup dengan biaya pas-pasan. Tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam proses-proses globalisasi, karena tidak semua orang mempunyai modal yang cukup untuk itu, karena tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam bidang manufaktur atau pasar dan bisnis, dan karena tidak semua orang dapat masuk ke dalam jaringan-jaringan bisnis yang cenderung untuk menutup dirinya

dari intrusi luar yang akan merugikan jaringan bisnis tersebut.

Akibatnya dalam kehidupan masyarakat perkotaan, dan juga masyarakat pedesaan, muncul adanya sekelompok kecil atau minoritas yang menjadi kaya dan sangat kaya, sedangkan yang lainnya menjadi miskin atau semakin miskin.

Kelompok kecil ini mempunyai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang amat besar dibandingkan dengan mereka yang miskin. Perbedaan antara yang kaya dari yang miskin menjadi semakin menyolok dalam masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga, karena kemampuan untuk akumulasi modal hanya dapat dilakukan oleh mereka yang tergolong sebagai pemilik modal. Globalisasi yang menekankan pada efisiensi dalam kegiatan kerja dan bisnis dan pencapaian keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya menyebabkan munculnya korban-korban rasionalisasi atau pemecatan pegawai dan buruh yang

dianggap tidak lagi menguntungkan atau hanya menjadi beban produksi.

Dampaknya adalah tingkat pengangguran atau pengangguran tersamar yang cukup tinggi dalam masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga.

Kelompok-kelompok kerabat, sebuah satuan primordial, adalah yang biasanya menampung dan melindungi para penganggur atau mereka yang terpuruk hidupnya. Sehingga di Indonesia, penganggur yang betul-betul seratus persen menganggur tidak pernah benar-benar ada.

Dalam masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga yang sebagian besar warga masyarakatnya menderita karena proses-proses globalisasi sebetulnya mereka ini tidak betul-betul menderita. Karena melalui televisi yang jaringannya dapat mencapai pelosok-pelosok pedesaan mereka ini dihibur, walaupun di satu sisi mereka itu dirangsang untuk menjadi konsumen yang baik melalui tayangan-tayangan iklan

untuk hidup yang lebih dengan membeli produk-produk tayangan iklan tersebut. Hidup menjadi seperti ada dalam dunia maya, dan tanpa disadari oleh para konsumen kehidupan mereka itu didefinisikan oleh iklan-iklan televisi. Mereka mempunyai standard hidup yang harus dipenuhi sebagaimana yang mereka ketahui dan yakini melalui iklan-iklan televisi. Karena iklan-iklan televisi tersebut bukan lagi sebagai iklan atau pemberitahuan tentang sesuatu produk tetapi lebih sebagai pencuci otak (brain washer). Mereka menjadi hidup lebih menderita lagi karena kehidupan yang dibayangkan dengan kehidupan senyatanya tidaklah sama.

Karena itu tidaklah mengherankan bahwa hampir semua bentuk kegiatan warga masyarakat Dunia Ketiga sebagai dampak dari globalisasi adalah bertujuan untuk memperoleh uang. Uang adalah nomor satu dalam kehidupan ini. Dengan uang maka impian mereka tentang standard hidup yang

mewah, yang mencuci otak mereka dari hari ke hari melalui tayangan televisi akan dapat mereka jalani. Berbagai kegiatan sektor informal dan PKL di daerah perkotaan yang menduduki badan jalan adalah salah satu perwujudan untuk memperoleh uang. Kegiatan ini merebak secara meluas di hampir semua kota di Indonesia disebabkan oleh bertambahnya jumlah penganggur. Tidak semuanya berhasil memperoleh uang yang mencukupi dalam sektor informal atau PKL. Mereka yang gagal banyak yang melakukan bunuh diri, bahkan bunuh diri oleh keluarga, dan bahkan oleh anak-anak sebagaimana yang terungkap dalam media cetak dan elektronika.

Berbagai bentuk pelarian dari kehidupan nyata juga terwujud dalam maraknya pengkonsumsian minuman keras dan narkoba. Para konsumen ini adalah mereka yang gagal untuk meraih kemenangan dalam proses-proses globalisasi. Kegagalan dalam memperoleh keuntungan uang atau kegagalan

dalam menampilkan jatidiri yang berhasil dalam proses-proses globalisasi dalam bidang mereka masing-masing. Diantara mereka yang gagal ada yang terobati dengan berbagai ideologi keagamaan yang mereka pelajari dan yakini, yang membuat mereka terlibat dalam berbagai bentuk jihad yang anti Amerika Serikat, yang mereka lihat sebagai sumber malapetaka dan super kafir. Ideologi keagamaan yang sumbernya adalah pikiran-pikiran Osama bin Laden yang memimpin gerakan Al Qaeda.

Begitu juga tidaklah mengherankan bahwa tindakan-tindakan kejahatan, dari berbagai bentuk kejahatan jalanan dengan kekerasan, pemalakan, pencurian, penipuan, perampokan, sampai dengan korupsi dan kolusi merebak di seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kondisi seperti ini mana mungkin dapat membangun ketahanan sosial-budaya? Jarak antara yang kaya dan miskin terlalu besar, dan perjuangan hidup untuk

memperoleh uang menjadi begitu keras dan berat bagi yang hidupnya serba *pas-pasan* sehingga prinsip *lu lu gue gue*, merupakan prinsip hidup yang selamat atau untuk memperoleh keuntungan uang. Prinsip ini tidak berlaku dalam lingkup keluarga dan kelompok kerabat atau persaudaraan yang sekeyakinan.

Solidaritas sosial dalam berbagai bentuk demokrasi atau dukungan terhadap tokoh politik atau tokoh sosial yang terkena perkara hukum atau politik ternyata ada uangnya. Berbagai bentuk solidaritas sosial dan berbagai ungkapannya yang bercorak vertikal maupun horizontal ternyata hanya solidaritas semu, karena ikatan-ikatan sosial berdasarkan kebudayaan bersama yang mereka miliki sebagai bangsa tidak ada. Kalau kita melihat ke belakang yaitu melihat peristiwa Mei 1998, mungkin tragedi Mei 1998 ini dapat dilihat sebagai dampak dari globalisasi yang telah melanda Indonesia. Dalam Zaman pemerintahan Presiden Soeharto tersebut

muncul, berkembang, dan mantap sekelompok kecil kapitalis orang Cina yang dinamakan konglomerat. Walaupun kecil mereka ini adalah kelompok yang dominan. Kegagalan kebijakan ekonomi di tahun 1998 telah memicu kemunculan anti Cina-konglomerat yang dilihat oleh orang banyak yang miskin di daerah perkotaan, terutama Jakarta, sebagai sumber malapetaka karena kolusi yang mereka lakukan dengan pejabat-pejabat negara yang korup. Kerusakan bukan lagi terhadap konglomerat yang minoritas dan dominan, tetapi terhadap orang Cina yang dilihat sebagai jatidiri sukubangsa dari konglomerat tersebut.

Korupsi dan Kolusi

Diantara berbagai tindakan kejahatan di Indonesia yang paling dilindungi oleh hukum adalah tindakan korupsi dan kolusi. Secara sederhana korupsi dapat dilihat sebagai tindakan penyalahgunaan

kewenangan dalam kebijakan yang menyebabkan kerugian negara dan menguntungkan yang membuat kebijakan. Penyalahgunaan kewenangan ini mencakup pemanipulasian uang atau biaya negara dan pencurian uang negara. Sedangkan kolusi adalah sebuah tindakan penyelewengan kebijakan untuk sebuah perusahaan atau orang, yang menguntungkan perusahaan atau orang tersebut dan si pembuat kebijakan, karena memperoleh imbalan uang dari perusahaan atau orang yang diuntungkan.

Korupsi dan kolusi di Indonesia dewasa ini dilakukan oleh pejabat negara dan pegawai negeri sipil serta militer dan polisi. Pejabat atau petinggi negara melakukan tindakan korupsi dan kolusi untuk memperkuat posisi sosial, ekonomi, dan politik mereka, sedangkan pegawai negeri, militer, atau polisi tingkat rendah melakukan tindakan tersebut untuk dapat bertahan hidup dalam era globalisasi ini. Pada masa sekarang kegiatan korupsi dan

kolusi tidak lagi dilakukan oleh pejabat secara individual tetapi dilakukan secara kelompok yang merupakan sebuah sindikat yang anggota-anggotanya saling melindungi keselamatan masing-masing dari tuntutan hukum. Dalam kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara, seringkali korupsi yang sebenarnya adalah masalah hukum digeser menjadi permasalahan politik. Sehingga kasus korupsi tersebut dipetieskan, dimana tersangka tidak pernah dihukum.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tiga serangkai kejahatan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Tiga macam kejahatan ini merupakan peluang yang ada dan muncul dalam masyarakat majemuk, sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan jajahan Hindia Belanda, pemerintah jajahan Jepang, dan dalam zaman Republik Indonesia (Suparlan 2004c). Keberadaan dan kemunculan korupsi dalam masyarakat majemuk adalah karena corak masyarakat majemuk itu

sendiri dimana mekanisme kontrol atas tindakan-tindakan penyalahgunaan kewenangan kebijakan tidak benar-benar fungsional, karena gaji pejabat negara dan pegawai negeri yang rendah, karena mereka itu diperlakukan sebagai *abdi negara* (hamba sahaya negara) dan bukannya sebagai profesional, dan karena perundangan yang dibuat adalah perundangan negara Barat yang melihat tindakan korupsi sebagai tindakan perorangan pejabat yang bersangkutan. Padahal kalau dilihat secara bersungguh-sungguh yang menikmati hasil korupsi bukan hanya perorangan pejabat yang bersangkutan, tetapi seluruh anggota keluarga dan bahkan anggota-anggota kelompok kerabatnya. Hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor adalah hukuman pengasingan, dengan dimasukkannya ke dalam penjara, dari kehidupan dalam masyarakat sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan korupsi lagi. Tetapi tidak ada ketentuan hukum harus mengembalikan uang

yang dikorup kepada negara, termasuk yang sudah dan sedang dinikmati oleh keluarga atau kelompok kerabatnya.

Kalau semua orang Indonesia melakukan tindakan korupsi dan/atau kolusi maka ketahanan sosial dan budaya juga dikorupsi. Karena model korupsi yaitu mencuri dan memanipulasi untuk keuntungan sendiri dengan merugikan negara atau orang lain, adalah sebuah model yang terserap dalam nilai-nilai budaya dari kebudayaan nasional Indonesia. Yaitu kebudayaan dalam berbangsa dan bernegara yang seharusnya dapat menciptakan dan memantapkan ketahanan sosial-budaya.

Menciptakan dan Membangun Ketahanan Sosial-Budaya

Apa yang kita punyai sebagai bangsa Indonesia dewasa ini adalah ketidakpastian peran dari sistem nasional atau pemerintahan nasional. Ini adalah produk dari sistem pemerin-

tahan presiden Suharto yang otoriter dan militeristik yang hancur berantakan diobrak-abrik oleh gelombang globalisasi melalui proses-proses pasar dan demokrasi. Sehingga yang harus kita pikirkan dan kita setuju bersama sekarang ini adalah corak demokrasi yang kita anut dengan segala keterbukaan dalam mekanisme kontrol hukumnya, kesederajatan bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal suku bangsa, ras, gender, umur, dan golongan sosialnya, dan hukum yang tidak memihak kepada yang berkuasa atau yang kuat serta penegakan hukum yang tidak korup.

Tahap-tahap yang mungkin harus dilalui dalam proses-proses tersebut di atas adalah mengubah masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural, penindakan secara tegas terhadap koruptor yang bukan hanya menghukum koruptor dengan hukuman yang ringan tetapi mencakup juga tindakan paksa mengembalikan uang yang telah dikorup atau

dicurinya dari negara, termasuk uang yang ada di tangan keluarga dan kelompok kerabatnya.

Membangun lapangan-lapangan kerja bagi orang banyak dari uang korupsi yang telah dikembalikan oleh para koruptor, sehingga kesejahteraan sosial-budaya dari masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan. Dengan cara ini maka kebanggaan terhadap pemerintah nasional dan dengan sendirinya juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dapat ditingkatkan. Acuan kebangsaan yang dibanggakan inilah yang sebenarnya menjadi ketahanan sosial-budaya masyarakat Indonesia dapat menjadi mantap.

Disamping itu, perlu dilakukan upaya secara nasional untuk mengingatkan kita semua pada Sumpah Pemuda dan pada Pancasila. Cara yang terbaik untuk mengingatkan kebangsaan kita adalah dengan mengharuskan kita semua mengikuti apel bendera di kantor-kantor dan membacakan Sumpah Pemuda dan Pancasila. Begitu juga sebaik-

nya murid sekolah dari tingkat SD s/d SMU diwajibkan apel bendera dengan membaca Sumpah Pemuda dan Pancasila sebelum pelajaran dimulai. Teks Sumpah Pemuda harus yang aslinya, bukan yang telah diselewengkan selama ini.

Disamping mengucapkan Sumpah Pemuda dan Pancasila, sebaiknya kantor-kantor pemerintahan dan sekolah memasang bendera merah putih di tiang depan kantor yang dipasang pagi hari dan diturunkan pada sore hari. Bendera merah putih juga dipasang di ruang kantor pimpinan atau di ruang kepala sekolah, disamping gambar presiden dan wakil presiden.

Tahapan berikutnya yang harus dipikirkan masak-masak adalah menegakkan keadilan berdasarkan atas hukum yang adil dan beradab. Selama ini kita hanya berupaya menegakkan hukum tetapi tidak menegakkan keadilan. Rasa ketidakadilan yang diderita masyarakat dapat menjadi isu-isu bagi acuan

konflik-konflik sosial dan melemahkan upaya-upaya memperkuat dan memantapkan ketahanan sosial-budaya. Hukum yang berkeadilan dan beradab tidak mungkin dibangun dan ditegakkan tanpa demokrasi. Dan kesemuanya itu tercakup dalam sebuah ideologi multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan-perbedaan dalam kesederajatan. Dalam multikulturalisme, perbedaan-perbedaan suku bangsa yang primordial dan askriptif digeser dan diganti oleh perbedaan-perbedaan secara budaya yang berlandaskan pada prinsip belajar dan mengalami guna memahami yang berbeda dan yang lebih luas jangkauannya daripada ruang lingkup kesukubangsaan.

Bacaan Acuan

Albrow, Martin dan Elizabeth King

1990 *Globalization: Knowledge and Society*. New York and London: Macmillan

Friedman, Thomas J.

2000 *The Lexus and Olive Tree*. New York: YPKIK

Suparlan, Parsudi

2004a *Hubungan antar-Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK

2004b "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme" *NASION*, No 1 Vol. 2, Desember 2004. PPSN

2004c "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Perspektif Masyarakat Majemuk". *Jurnal POLISI INDONESIA*, No 6, Februari 2004. YPKIK.